

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR KEP-1/PPID/2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2022 melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2021 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2022;
- b. bahwa daftar informasi publik Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan diberikan persetujuan oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan memperhatikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terhadap Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2021 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2021 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



RAHAYU PUSPASARI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710; KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3866120; FAKSIMILE (021) 3866120; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
1.	Rincian Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah, yang terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; c. Dana Alokasi Khusus Fisik; d. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik; e. Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal;	a. Direktorat Transfer Umum (DTU). b. Direktorat Transfer Khusus (DTK). c. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi (ESI).	a. Direktur DTU. b. Direktur DTK. c. Direktur ESI.	Sebelum dan pada tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.



No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	f. Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan g. Dana Desa. Kode Arsip: 1. IK0.0.2 (Pengalokasian Dana Bagi Hasil [DBH]) 2. IK0.1.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Umum [DAU]) 3. IK0.2.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik) 4. IK0.3.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik) 5. IK0.9.2 (Pengalokasian Insentif Fiskal) 6. IK0.5.2 (Pengalokasian Dana Otonomi Khusus) 7. IK0.7.1 (Pengalokasian Dana Keistimewaan) 8. IK0.8.2 (Pengalokasian Dana Desa)					

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	9. IK5.0 (Laporan Keuangan TKD)					
2.	Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi. Kode Arsip: IK1.0 (Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPT).	Direktur KPT.	Sebelum dan pada tahun 2023, Jakarta.	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	5 tahun setelah penciptaan arsip.
3.	Buku Pintar Dana Desa. Kode Arsip: HM0.3.0 (Publikasi)	Direktorat DTU.	Direktur DTU.	Oktober 2019, Jakarta.	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	3 tahun setelah penciptaan arsip.
4.	Buku Kumpulan Profil Desa. Kode Arsip: HM0.3.0 (Publikasi)	Direktorat DTU.	Direktur DTU.	2019, Jakarta.	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	3 tahun setelah penciptaan arsip.
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)					
6.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Fungsi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Urusan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Pajak. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Retribusi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.
10.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.
11.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.
12.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulanan.	Direktorat ESI.	Direktur ESI.	Bulanan, sebelum dan sepanjang tahun 2023, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)					